

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Literatur *review* merupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur *review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji yakni terkait peranan WWF (*World Wide Fund For Nature*) yang kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relevan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi dan berita-berita resmi. Dalam penelitian ini, penulis *me-review* dua literatur yaitu:

2.1.1. Peranan WWF (*World Wide Fund for Nature*) Dalam Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva Yeni Hutabalian dijelaskan bahwa keragaman jenis atau biodiversitas dipengaruhi oleh lingkungan yang memiliki tingkat interaksi antara vegetasi dan satwa (flora dan fauna) yang sangat tinggi dalam suatu ekosistem. Kerusakan terhadap vegetasi yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi seperti pembakaran hutan dan lahan, berpengaruh terhadap ekosistem. Deforestasi menyebabkan

tutupan lahan/tajuk akan semakin rendah dan akan semakin rendah dan akan semakin

luas terbukanya lahan yang kemudian akan meningkatkan pelepasan CO₂ sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah biota perairan yang berada disekitarnya.

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terletak di tiga kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Pelalawan, Kampar dan Kuantan Singingi. Tesso Nilo diambil dari dua nama sungai yang berada di bagian timur yaitu Sungai Nilo, dan di bagian barat yaitu Sungai Tesso. Kawasan Tesso Nilo juga menjadi area tangkapan air (*catchment area*) untuk kedua sungai tersebut dan Sungai Segati di bagian utara. Kerusakan ekosistem hutan di TNTN dipandang sebagai ancaman keamanan lingkungan yang berdampak terhadap keamanan manusia, sosial, budaya, ekonomi dan perubahan iklim yang terjadi.

Melihat kondisi hutan TNTN yang terus menerus mengalami degradasi, maka WWF kemudian melakukan upaya-upaya untuk mendesak pemerintah agar segera menghasilkan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan. Menurut WWF jika kerusakan lahan gambur di daerah TNTN terus dibiarkan, maka bukan Indonesia saja yang akan menanggung akibatnya, akan tetapi masyarakat regional maupun global juga akan ikut merasakan akibatnya.

Peran WWF dalam pembentukan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, diawali dengan melakukan kerjasama bersama *stakeholder* diantaranya BKSDA provinsi Riau, Pemda Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pemda Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Provinsi Riau, masyarakat setempat dan

berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah terkait. WWF mengusulkan untuk melakukan upaya advokasi yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP, para cukong besar, elit masyarakat, pejabat pemerintah daerah yang memberikan izin dan sebagian masyarakat dari desa terdekat atau para pendatang yang melakukan perambahan. Untuk melindungi kawasan dan menekan laju degradasi kawasan hutan Tesso Nilo dari kegiatan pembalakan liar dan pembakaran lebih lanjut, diluncurkanlah program kerjasama patrol pengamanan kawasan TNTN antara Balai KSDA Riau dan WWF Indonesia sejak April 2004. (Hutabalian, 2014)

2.1.2. Peran WWF (*World Wide Fund for Nature*) Dalam Program *Heart Of Borneo* (HoB) Di Indonesia Periode 2012-2013

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfi Jamilatul Wardah dijelaskan bahwa salah satu wilayah sektor kehutanan Indonesia yang luas ialah Kalimantan, selain itu wilayah Kalimantan juga menyumbangkan angka terbesar dari deforestasi dan kerusakan hutan Indonesia yaitu sekitar 41% dari total deforestasi dan kerusakan hutan. Selain itu, deforestasi hutan di Kalimantan mengancam kehidupan flora dan fauna di hutan terutama spesies yang terancam punah, seperti badak, orangutan dan gajah.

HoB (*Heart of Borneo*) adalah program konservasi lintas batas antara pemerintah Brunei, Indonesia dan Malaysia yang didukung oleh aktor non negara seperti *World Wide Fund of Nature* (WWF). Inisiatif HoB dideklarasikan pada 12 Februari 2007, yang bertujuan untuk mengelola kawasan lintas batas, mengelola kawasan lindung, mengelola sumber daya

alam berkelanjutan, mengembangkan ekowisata, dan meningkatkan kapasitas manusia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada pengelolaan inisiatif HoB tersebut, masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda. Indonesia memiliki pengelolaan program HoB yang dilakukan secara kolaboratif dari pihak pemerintah dengan mitra lainnya dan salah satu mitra HoB pemerintah Indonesia adalah WWF. Selain menjadi mitra, WWF juga sebagai satu-satunya aktor non negara yang dilibatkan dalam struktur organisasi kelompok kerja nasional HoB pemerintah Indonesia. (WWF Global, “Heart of Borneo” *WWF Global*, [database on-line] tersedia di http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/borneo_forest/; Internet; diakses pada Maret 10, 2014)

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan dibantu oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk memahami fenomena-fenomena dalam studi hubungan internasional. Oleh sebab itu, adapun teori dan konsep yang penulis gunakan untuk penelitian ini diantaranya adalah:

2.2.1. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state*

actor, memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar **(Perwita & Yani, 2005:3-4)**.

Menurut Suwardi Wiraatmaja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa hubungan internasional adalah sebuah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintasi batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut state actor dan non state actor yang meliputi individu, tekanan-tekanan, proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir manusia **(Wiraatmaja Suwardi, 1970:33)**.

Kajian dalam hubungan internasional tidak hanya mengenai diplomasi saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dalam mengadakan hubungan antar bangsa. Selain hubungan antar bangsa, hubungan internasional mencakup juga kerjasama antara organisasi dengan negara, organisasi internasional dengan organisasi internasional dan bahkan organisasi internasional dengan organisasi lokal.

Berdasarkan konsep diatas, WWF diartikan sebagai *non state actor* yang bergerak di bidang lingkungan serta mengadakan hubungan kerjasama organisasi dengan negara dan juga organisasi dengan organisasi untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan di negara tersebut. Dalam hal ini, WWF mengadakan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan Kalimantan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan.

2.2.2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dan paling tidak dua negara merdeka atau lebih yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota.

Organisasi Internasional yang diartikan sebagai organisasi antarpemerintah adalah fenomena yang relatif baru dalam hubungan internasional. Organisasi Internasional pertama kali muncul di tempat kejadian lebih dari satu abad yang lalu, dalam sistem negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun . Sebelum munculnya organisasi inklusif telah ada aliansi militer, organisasi pemerintah eksklusif, di antara

negara-negara berdaulat. Mendahului sistem negara secara keseluruhan adalah aktor-aktor non-negara internasional yang penting seperti Gereja Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci. Tetap aktor-aktor ini bukan antar pemerintah, melainkan ada secara independen dari mereka.

Organisasi pertama dibuat oleh perjanjian antar negara yang dirancang khusus untuk menghadapi masalah yang dihadapi sejumlah negara secara bersamaan pada abad ke-19. Pada awalnya, organisasi internasional dirancang untuk mengatasi masalah yang spesifik yang bersifat ekonomi dan teknis, seperti membuat aturan yang jelas untuk navigasi di RhineRiver, mengirimkan surat internasional, atau mengelola perikanan furseal Pasifik dengan cara yang berkelanjutan. Yang paling terkenal dari organisasi-organisasi ini adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang diciptakan untuk membantu negara-negara anggotanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan menghindari terulangnya kengerian perang.

Sejak Perang Dunia II, jumlah organisasi internasional telah berkembang biak, lambat pada awalnya, dan lebih cepat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut *Union of International Associations*, jumlah organisasi antarpemerintah melewati 1.000 pada awal 1980-an dan pada awal abad kedua puluh satu, ada lebih dari 5.000 (Samuel J. Barkin, 2006:1-6).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan

serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajaki sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrument dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (**Suryokusumo, 2010:10**).

Menurut Rudy, pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (**Rudy, 2002:93-94**).

Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur:

- a) Kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara
- b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
- c) Baik antar pemerintah atau non-pemerintah

d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa WWF merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan terhadap lingkungan dengan tujuan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan kerjasama dengan aktor-aktor lainnya.

2.2.2.1 *International Non-Governmental Organization (INGO)*

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis & Nazneen, 2009:1).

Laporan PBB tahun 1995 tentang tata kelola global memperkirakan bahwa ada hampir 29.000 organisasi non pemerintah internasional. Angka nasional bahkan lebih tinggi: Amerika Serikat diperkirakan memiliki 2 juta organisasi non pemerintah, kebanyakan dari mereka terbentuk dalam 30 tahun terakhir. Rusia memiliki 65.000 organisasi non pemerintah internasional. Lusinan organisasi dapat dibuat setiap hari. Di Kenya saja, sekitar 240 organisasi non pemerintah internasional muncul setiap tahun.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah kelompok organisasi non pemerintah kemanusiaan terbesar di dunia.

2.2.2.1.1 Jenis Jenis *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Dalam dokumen *World Bank* (1995), cenderung membedakan NGO dengan dua kategori utama, yaitu NGO operasional yang tujuan utamanya adalah mendesain dan mengimplementasikan proyek-proyek terkait pembangunan dan NGO advokasi yang tujuan utamanya adalah membela atau mempromosikan tujuan tertentu dan yang berupaya mempengaruhi kebijakan dan praktik Bank. Namun perlu di catat bahwa dua kategori tersebut tidak saling eksklusif. Semakin banyak NGO yang terlibat dalam kegiatan operasional dan advokasi, dan beberapa kelompok advokasi, sementara tidak terlibat langsung dalam merancang dan mengimplementasikan proyek yang hanya memfokuskan pada masalah spesifik terkait proyek yang memiliki hubungan dengan NGO tersebut. Dari pernyataan tersebut, *World Bank* memfokuskan pada legitimasi keterlibatan NGO dalam pemerintahan internasional dan pembuatan kebijakan. Ini berarti fokus utama akan NGO yang terutama berorientasi pada bantuan dan advokasi, sementara banyak dari apa yang akan dikatakan juga berlaku untuk misalnya organisasi masyarakat sipil sejauh bahwa mereka juga terlibat dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan melalui bantuan dan advokasi. Memiliki atau menjalankan fungsi operasional atau advokasi tidak dianggap sebagai memadai atau bahkan kondisi yang diperlukan untuk

menjadi NGO. Namun demikian, berfokus dalam membedakan antara kedua fungsi ini tampaknya penting dilihat dari perspektif legitimasi.

Dalam penelitian ini, WWF sebagai subjek penelitian memiliki fungsi operasional yaitu merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan pada lingkungan hidup seperti upaya pelestarian hutan, perlindungan kesejahteraan hewan dan lain sebagainya.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu wujud dari kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh yang dapat mendukung kepentingan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat diselesaikan dengan membentuk kerjasama internasional (**Perwita & Yani, 2005:33-34**).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama

menurut Holsti (1988), yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (**Betsill & Elisabeth, 2008:21**)

Menurut konsep diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional WWF dengan Pemerintah Indonesia dan Kalimantan Barat menjalin kerjasama untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melestarikan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan.

2.2.4. Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional

Isu lingkungan dan permasalahan pemanasan global adalah permasalahan yang cukup baru bagi hubungan internasional. Walaupun permasalahan ini menjadi bagian dalam hubungan internasional, tidak mungkin diselesaikan dengan cara tradisional seperti pertahanan militer, pencegahan dan lain sebagainya. Sangat jelas bahwa isu lingkungan tidak mungkin diselesaikan dengan paradigma tradisional hubungan internasional, sehingga membutuhkan visi dan pendekatan yang baru.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (<http://jdih.menlh.go.id/pdf> Diakses pada tanggal 19 Juni 2019).

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, yang ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa konferensi internasional antara lain: pertama, mengenai “Human Environment” di Stocholen Swedia. Konferensi kedua dalam siding majelis umum PBB ke-27 membentuk “*Governing Council United Nations Environment Program (GC-UNEP)*” yang memberi mandat antara lain:

1. Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup
2. Menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, termasuk kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Konferensi ini kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan United

Nations Enviromental Program, yang merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antarnegara, yang kemudian melahirkan gagasan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional.

Seiring dengan diadakannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai lingkungan dari tahun ke tahun, yang terus mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antarnegara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dimana hasil dari salah satu pembahasan dalam UNFCCC yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut *Protocol Kyoto*, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC.

Lingkungan secara umum dan sumber daya alam khususnya sangat terkait dengan keamanan, yang merupakan salah satu konsep politik internasional yang paling kontroversial. Dalam dunia yang terus berubah, masalah lingkungan kini dibingkai dalam konsep keamanan, karena pengertian tradisional tentang keamanan, yang berfokus pada keamanan militer, kurangnya relevansi dalam dunia fenomena transnasional yang mampu mempengaruhi berbagai objek referensi manusia. Keamanan

lingkungan memperluas konsep keamanan dengan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan terhadap hal-hal yang dihargai masyarakat. Risiko tersebut termasuk perubahan iklim, penggundulan hutan, erosi tanah dan penggurunan, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara, tanah dan air, pengasaman lautan, penipisan lapisan ozon, gangguan siklus nitrogen dan fosfor dan lainnya.

Lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi satwa-satwa liar, karena lingkungan hidup yang baik adalah habitat alami dari satwa-satwa liar yang tinggal di dalamnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup, tetapi kesadaran diri sendiri akan sangat membantu banyak dalam menjaga lingkungan sekitar menjadi baik dan terawat.

Kehadiran WWF sebagai INGO lingkungan telah melakukan upaya-upaya dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui program konservasi hutan, air tawar dan spesies di Indonesia. Program ini merupakan program prioritas WWF yang berupaya untuk melindungi hutan alam dan keragaman hayati tersisa, membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan mengembangkan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan. WWF juga memfasilitasi rencana pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan dan restorasi hutan di sejumlah wilayah prioritas.

2.2.5 Environmentalisme (*Environmentalism*)

Environmentalisme adalah gerakan sosial yang dimotori kaum penyelamat lingkungan hidup. Gerakan ini berusaha dengan segala cara,

tanpa kekerasan, mulai dari aksi jalanan, lobi politik hingga pendidikan publik untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem. Kaum environmentalis peduli pada isu-isu pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim dan rekayasa genetika pada produk-produk makanan (Matthew, 2001: 277-307). Environmentalisme adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung, sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya. Salah satu contoh pertama adalah orang-orang Bishnois di Rajasthan, India yang rela mati demi mencegah penebangan pohon-pohon di desa mereka atas perintah raja.

Perspektif environmental didasari oleh adanya *green movement*, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah nuklir.

Tiga aspek utama konsep environmentalisme:

1. Environmentalisme adalah sebagai suatu konsep yang berhubungan erat dengan falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar yang dimaksudkan adalah perbahasan berkenaan hakikat sebenarnya hubungan manusia dan alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga menjelaskan bagaimana sebenarnya perilaku yang harmonis

terhadap alam sekitar dan bagaimana pula perilaku yang mengganggu keseimbangannya.

2. Environmentalisme adalah satu konsep yang berhubungan erat dengan perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Ideologi merujuk kepada suatu doktrin yang diyakini oleh seseorang individu ataupun suatu kelompok yang menjadi dasar kepada kegiatan yang dilakukan. Perjuangan yang berasaskan ideologi alam sekitar ini berusaha menerapkan ideologi tersebut ke dalam pemikiran masyarakat luas sebagai agenda bertindak dalam lapangan kehidupan.
3. Environmentalisme adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan perancangan pengamanan alam sekitar. Dengan pengertian lain, environmentalisme merujuk kepada pihak berwenang berasaskan idealism alam sekitar agar dilaksanakan di semua aspek. (Apriwan, 2011)

WWF dalam hal ini, sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan menyadari dengan banyaknya kebutuhan manusia, maka semakin banyak lahan lingkungan yang dikorbankan. Visi WWF yang untuk menyelamatkan lingkungan, membuat WWF melakukan beberapa upaya salah satunya adalah dengan konservasi hutan lindung.

2.2.6 Konsep Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang

ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara, namun juga menjadi tanggung jawab setiap makhluk di muka bumi ini. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997 pasal 1 sampai 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah “Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup”. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakatnya juga bertambah. Hal ini mengakibatkan banyak sekali permasalahan lingkungan mulai dari sungai yang kotor, penebangan hutan, polusi udara sehingga dapat mengancam keamanan negara.

2.2.7 Konsep Konservasi Lingkungan

Konservasi berasal dari kata “*Conservation*” yang terdiri dari kata *con* yang berarti bersama/bersatu dan *servare* yang berarti simpan/selamat yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana/*wise use*. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, konservasi adalah salah satu pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi dibagi menjadi dua yaitu konservasi *ex-situ* dan konservasi *in-situ*.

Konservasi *in-situ* adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestifikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang. Jenis kegiatan konservasi *in-situ* adalah kebun binatang, taman safari, kebun botani dan museum. Konservasi *ex-situ* merupakan metode konservasi yang mengkonservasikan spesies di luar distribusi alami dari populasi tetuanya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menemukannya atau bagiannya di bawah perlindungan manusia. Jenis kegiatan konservasi *ex-situ* adalah cagar alam dan suaka margasatwa.

Konservasi telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 yang berbunyi: “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.

Pada tahun 1972 dilakukan pertemuan yang merupakan langkah awal dalam pengembangan strategi konservasi global. Pertemuan tersebut dikenal dengan Stockholm Conference on the Human Environment. Hasil

dari pertemuan tersebut antara lain pembentukan UNEP (The United Nations Environment Program) untuk menghadapi tantangan permasalahan lingkungan hidup di dunia, yang masih terfokus pada kerusakan dan konservasi sumber daya alam.

Secara keseluruhan, Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas aktor; bersama dan terpadu baik oleh pemerintah maupun masyarakat (mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi), serta pihak-pihak lainnya. Oleh sebab itu, WWF bersama dengan Pemerintah Kalimantan Barat mengadakan kerjasama untuk melakukan konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan.

2.2.8 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dikenal dengan beberapa tipe yaitu:

1. Tipe ekologis penting atau nilai konservasi tinggi di dalamnya termasuk kawasan mangrove, karst, gambut dan perairan

darat/lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter).

2. Tipe landscape di dalamnya termasuk habitat endemik lintasan satwa liar dan,
3. Tipe pencadangan sumberdaya alam didalamnya termasuk taman keanekaragaman hayati (Kehati).

Kawasan Ekosistem Esensial sangat berperan penting dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik). Karena kawasan tersebut melindungi terancamnya kawasan diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai keunikan baik spesies flora maupun fauna. Bilamana dibiarkan akan ada kerusakan di kawasan tersebut dengan adanya penurunan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, maupun pencemaran lingkungan. Selain itu, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mempunyai posisi yang memberikan kontribusi berupa barang dan jasa lingkungan serta menunjang tumbuhnya sektor-sektor ekonomi ini tidak menyentuh atau memberi kontribusi terhadap investasi pengelolaan ekosistem esensial.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa di tahun 2020 capaian perlindungan terrestrial direncanakan mencapai 17% dari wilayah daratan dan kawasan perairan darat (32,48 juta Ha) dan 10% dari kawasan pesisir dan laut. Dimana capaian kawasan perlindungan terrestrial saat ini adalah 22,48 juta Ha. Masih terdapat kekurangan 10 juta hektar diharapkan adanya dukungan

peran dari optimalisasi pengelolaan KEE, koridor satwa liar, dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Untuk itu perlu pelestarian dan pengelolaan secara efektif dan selaras kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dengan memperhatikan keterwakilan ekologis.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pelopor utama yang menetapkan adanya Kawasan Ekosistem Esensial yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk pelestarian hutan dan habitat satwa liar. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah di daerah Labian Leboyan. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga hutan yang dikenal dengan *Heart of Borneo*. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan memiliki luas 112.975 ha yang menghubungkan antara Taman Nasional Betung Karihun dan Danau Sentarum, dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan dan pengelolaan hutan, dan secara tradisional diakui oleh masyarakat adat.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta pemanfaatan kawasan ekosistem esensial secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya kawasan ekosistem esensial di Kalimantan Barat khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Labian Leboyan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati baik ekosistem maupun spesies unik yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.9 World Wide Fund for Nature (WWF)

World Wide Fund for Nature (WWF) adalah organisasi internasional yang independen, tidak memihak dan obyektif dalam berurusan dengan pemerintah, partai politik, organisasi dan individu lain. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu melestarikan lingkungan alam dan proses ekologi di seluruh dunia. Hal ini diambil untuk memasukkan fauna dan flora, *landscape*, air, tanah, udara dan sumber daya alam lainnya, dengan penekanan khusus pada pemeliharaan proses ekologi esensial dan sistem pendukung kehidupan, dan pada pelestarian genetik, spesies, dan ekosistem, dan untuk memastikan bahwa pemanfaatan spesies liar dan ekosistem alami yang berkelanjutan, dan khususnya:

- a. Untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana untuk konservasi alam, untuk meninjau kebutuhan jangka panjang konservasi di seluruh dunia dan untuk mempelajari dan mengembangkan cara memenuhi persyaratan ini.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya konservasi alam dan membantu dalam merancang, memproduksi dan membuat bahan yang cocok yang tersedia dan tujuan pendidikan, kampanye, pameran dan media untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan gerakan konservasi di seluruh dunia.
- c. Untuk membiayai kegiatan konservasi dan proyek-proyek termasuk penelitian dan pertukaran ilmuwan, spesialis dalam konservasi alam, mahasiswa dan lain-lain terutama dari negara-negara berkembang, dan

untuk mempromosikan dan berpartisipasi dalam konferensi, seminar, ceramah, pertemuan dan diskusi sebagai kelanjutan konservasi alam di seluruh dunia.

- d. Untuk melindungi, memperoleh, mengelola, mengeksploitasi secara komersial dan membuang tanah dan properti lainnya dan sumber daya, termasuk kekayaan intelektual.
- e. Mengembangkan dukungan moral dan keuangan di seluruh dunia untuk konservasi alam dan menunjuk wakil dan membangun afiliasi, terkait atau organisasi anak dalam setiap bagian dari dunia dan untuk bekerja sama dengan dan dukungan organisasi-organisasi lain di bidang konservasi, dan terlibat dalam keuangan, komersial, dan kegiatan kondusif lainnya.
- f. Untuk mencapai misi sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Internasional sesuai dengan tujuan di atas.

Berdirinya WWF (waktu itu masih *World Wildlife Fund*) bermula dari pemikiran energik seorang pakar biologi berkebangsaan Inggris, Sir Julian Huxley. Huxley saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal pertama badan milik PBB, UNESCO.

Tepat pada tanggal 11 September 1961, WWF berdiri dimana Peter Scott menjadi ketuanya yang pertama. Scott juga menjabat sebagai Wakil Presiden *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Negara yang dipilih untuk menjadi markas adalah Swiss karena sudah terkenal dengan sikap kenetralannya. Dan disaat yang bersamaan, tiba seekor

beruang Panda bernama Chi-Chi di kebun binatang London. Oleh karena itu, Panda dijadikan sebagai simbol organisasi internasional WWF.

WWF Internasional memulai debutnya secara global, dengan membuka jaringan lintas benua dan negara, serta mengeluarkan berbagai imbauan nasional yang menekankan pentingnya pelestarian alam. Pada era 1980-an, WWF memperluas jaringan kerja dengan berbagai organisasi serupa bertaraf internasional, misalnya dengan badan-badan organisasi PBB. Strategi ini memungkinkan penyebaran kepedulian secara global dan holistik. WWF Internasional lalu mengubah nama organisasi, agar lebih pas dengan perluasan aktivitasnya menjadi *World Wide Fund for Nature*. Saat ini WWF memiliki 4,7 juta pendukung dan sebuah jaringan global yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 22 kantor program dan lima organisasi afiliasi.

WWF sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan hidup mempunyai misi yaitu melestarikan alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak untuk keanekaragaman kehidupan di Bumi. Sedangkan visi WWF adalah untuk membangun masa depan di mana orang hidup dalam harmoni dengan alam.

WWF berusaha untuk menyelamatkan planet, mendamaikan kebutuhan manusia dan kebutuhan orang lain yang berbagi bumi. WWF berusaha untuk menjalankan konservasi yang manusiawi dalam arti yang luas. Dari komunitas terkecil hingga organisasi multinasional terbesar WWF berusaha untuk menginspirasi orang lain yang bisa memajukan konservasi.

Sumber dana WWF berasal dari individu, sumber-sumber pemerintah, perusahaan dan lain-lain. Penyumbang dana terbesar WWF berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang disebut dengan negara-negara *fundraiser*, mereka melakukan penggalangan dana melalui kampanye dan danayang di peroleh kebanyakan berasal dari individu, contohnya dari WWF Belanda yang mendapat suntikan dana dari sebagian besar individual masyarakat yang memberikan bantuan langsung baik dalam bentuk materi juga kepada WWF.

Struktur WWF Internasional dibagi menjadi 3 jenis organisasi di bawahnya, yaitu:

1. *Project Office* WWF
2. *Programme Office* WWF

Kedua jenis organisasi ini hanya menjadi eksekutor dari program-program kerja yang disusun oleh WWF Global di negara tempat kantor tersebut didirikan.

3. *National Office* WWF

National Office ini sudah memiliki organisasi sendiri dan *base-nya* adalah lokal. Setiap *National Office* berhak menetapkan kebijakan dan program untuk organisasinya, namun tetap menggunakan logo dan afiliasi WWF dengan membayar alokasi tertentu dari selisih pemasukan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan oleh *National Office* kepada WWF Global Pusat.

2.2.9.1 WWF-Indonesia

WWF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional, melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang hampir punah dimana hanya tersisa sekitar 20 individu. Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, lambat laun jumlah populasi satwa bercula satu itu meningkat hingga stabil sekitar 4-50 individu pada survey tahun 1980-an.

Pada tahun 1998, WWF Indonesia resmi menjadi lembaga nasional berbadan hukum Yayasan. Dengan demikian WWF Indonesia memiliki entitas legal, independen, berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia. WWF Indonesia saat ini bergiat di 27 wilayah kerja lapangan, tepatnya di 17 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua yang didukung oleh 500 staff. Sejak 2006 hingga 2013, WWF Indonesia didukung oleh sekitar 64 ribu supporter di dalam negeri.

Kepengurusan WWF-Indonesia terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas. Mereka merupakan lembaga penentu arahan strategis dan finansial, kebijakan dan perencanaan, monitoring keberhasilan dan kepentingan yayasan WWF Indonesia di dalam jaringan global WWF. Kepengurusan ini mendukung CEO dan Senior Management Team diantaranya dalam tata kelola dan pengembangan institusi dan menetapkan serta mengimplementasikan rencana strategis organisasi.

Sumber dana WWF Indonesia berasal dari 40 lembaga donor, aid agencies, serta dukungan lebih dari total 64.000 supporter kami di seluruh Indonesia (data tahun 2013).

2.2.9.1.1 Kerjasama WWF Indonesia dan Pemerintah Kalimantan Barat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

WWF Indonesia merupakan bagian dari WWF Internasional dan masuk ke dalam jaringan WWF Internasional ke-27. Hal ini mendorong WWF Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga lingkungan hidup di wilayah Indonesia.

WWF Indonesia bagian Kalimantan Barat juga banyak mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kalimantan Barat. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Sintang bersama WWF Indonesia mengadakan perjanjian kerja sama Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kabupaten untuk perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Kerjasama ini menjadi konsep dasar dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Muller (KEM) di Kabupaten Sintang. KEM ini berfungsi melindungi dan menyangga fungsi ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang hidup di sekitarnya. Dalam kawasan strategis nasional (KSN) Heart of Borneo, KEM diproyeksikan untuk menjadi kawasan yang berfungsi sebagai koridor ekologis yang menjamin pergerakan satwa liar yang hidup di dalamnya. Kawasan ini menghubungkan ekosistem hutan hujan tropis di 3 kawasan konservasi yakni Kalbar, Kalteng dan Kaltim.

Selain itu tahun 2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama WWF Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama operasional terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta tumbuhan dan satwa liar. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat dukungan terhadap program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Dan juga di tahun 2017, Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Yayasan WWF Indonesia menyepakati kerja sama untuk menyelamatkan ekosistem gambut yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan ditandatangani di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Langkah ini untuk menginsentifkan, memperkuat dan pembelajaran terhadap restorasi gambut yang sebenarnya sudah dilakukan WWF terlebih dahulu.

2.2.10 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan

Daerah Aliran Sungai (DAS) Labian Leboyan terletak di antara dua taman nasional yaitu Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Labian Leboyan terkenal sebagai 'koridor' karena menjadi lintasan dan habitat satwa liar termasuk orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*). Di bagian hulu sebagian besar berstatus hutan lindung, di bagian hilir hutan produksi dan muaranya Danau Sentarum yang merupakan taman nasional. Berdasarkan data Colupsia (2015), tata guna dan tutupan lahan di DAS ini terdiri dari hutan yang relatif baik 65,79%, hutan terdegradasi 14,75%, pertanian tradisional (ladang, damun, kebun) 14,47%, dan lahan basah 4,99% .

WWF Indonesia mensurvei Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sebagai *hotspot* orangutan yang penting. Berdasarkan survey WWF tahun 2005, Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) merupakan habitat bagi 550-1830 individu orangutan. Sedangkan Taman Nasional Danau Sentarum menurut survey tahun 2009, memiliki 771-1006 individu orangutan. Di DAS Labian Leboyan, orangutan dijumpai di setiap lokasi, namun populasi pada hutan dataran rendah lebih tinggi daripada hutan rawa.

Karena dengan temuan-temuan yang telah diteliti beberapa tahun tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 2017, Pemerintah Kalimantan Barat dan LSM resmi menandatangani protokol penetapan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Orangutan Kapuas

Hulu. Kebijakan pengelolaan KEE ini merupakan inisiatif dari Direktorat KSDAE Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian LHK.

Pihak yang menandatangani protokol kerjasama tersebut antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum dan Yayasan WWF Indonesia.

Labian Leboyan dipilih sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karena memiliki fungsi hidrologis yang tinggi. Selain itu fungsi ekosistem teresterialnya juga baik. Labian Leboyan juga menjadi identitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta jalur migrasi orangutan yang diharapkan populasi orangutan akan terjaga sehingga kepunahan tidak akan terjadi.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan teori-teori yang dikemukakan diatas penulis membuat hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut:

“Dengan ditandatangani protokol penetapan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Orangutan Kapuas Hulu oleh WWF dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, maka Kawasan Ekosistem Esensial dapat dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Dengan ditandatangani protokol penetapan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Kapuas Hulu oleh WWF dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,	<p>1. Melakukan kerjasama antara WWF dan Pemerintah Kalimantan Barat untuk melestarikan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Kapuas Hulu.</p> <p>2. Menandatangani protokol penetapan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Kapuas Hulu oleh WWF dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>3. Memfasilitasi</p>	<p>1. Mengadakan pertemuan kesepakatan kerjasama yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2017.</p> <p>2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional Penetapan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Orangutan.</p> <p>3. Menghubungkan kawasan-kawasan lindung seperti Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau</p>

	<p>jaringan dari kawasan-kawasan lindung sebagai perlindungan spesies kunci</p> <p>4. Melakukan kampanye penyadartahuan tentang konservasi orangutan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berbatasan dengan habitat.</p>	<p>Sentarum dengan “koridor satwa” yaitu Koridor Orangutan Labian Leboyan yang dikelola secara teliti dan menjadikan Labian Leboyan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.</p> <p>4. Dengan melakukan kegiatan seminar, donasi untuk kegiatan konservasi dan memberikan informasi mengenai konservasi orangutan melalui media sosial.</p>
<p><i>Maka,</i> Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan dapat dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.</p>	<p>1. Adanya penentuan Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan dari tipologi dan kriteria seperti Ekosistem Lahan Basah, Koridor</p>	<p>1. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan termasuk dalam tipologi dan kriteria Koridor Hidupan Liar dikarenakan Labian</p>

	<p>Hidupan Liar, Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Taman Keanekaragaman Hayati, Areal Konservasi Masyarakat.</p> <p>2. Prinsip-prinsip konservasi yang dicanangkan WWF meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pola kerjasama multipihak yang bekerja pada kawasan konservasi -Adanya upaya advokasi pengelolaan kolaboratif kepada penentu kebijakan dan pihak lain - Adanya visi bersama multipihak tentang kebijakan pembangunan 	<p>Leboyan adalah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Orangutan yang merupakan hewan yang terancam punah dan dilindungi.</p> <p>2. WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat melakukan kerjasama pada konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Labian Leboyan Koridor Orangutan dengan melalui beberapa pertimbangan seperti memiliki nilai penting dalam aspek ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta memiliki nilai penting bagi konservasi</p>
--	--	---

	<p>berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya membangun kesepakatan penyelesaian konflik - Didorongnya kebijakan alokasi anggaran nasional dan daerah. 	<p>kenaekaragaman hayati. Arah pengelolaan Kapuas Hulu pun bertumpu pada tiga pilar pembangunan. Ketiganya adalah Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) Agropolitan dari sudut kepentingan ekonomi, KSK Ekowisata dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi dan KSK Koridor dari sudut kepentingan lingkungan.</p>
--	---	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

